



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan No. Telp. (0567) 21133, 21552

P U T U S S I B A U 78711

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1.a TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Inspektorat diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang indikator Kinerja Individu Inspektorat
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
- b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Penilaian Indikator Kinerja dilakukan oleh Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu setiap Triwulan Berjalan.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :

- a. Perencanaan Strategis Inspektorat;
- b. Perencanaan Tahunan Inspektorat;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 26 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,



BUNG TOMO, S.Hut.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700604 199803 1 009

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1.a. TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris
2. Tugas pokok : Membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi serta fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat
3. Fungsi :
 1. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
 2. pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Inspektorat;;
 3. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 4. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 5. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
 6. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
 7. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
 8. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Inspektorat;
 9. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - 10.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang berkualitas	Jumlah Laporan yang mendukung Program Capaian Aksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah	$\frac{\text{Jumlah laporan MCP yang terlaksana}}{\text{jumlahTotal laporan MCP}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP	Assesment dari BPKP	QA BPKP
		Nilai Sakip Inspektorat	Assesment dari Tim SAKIP	Laporan LHE SAKIP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

2. Tugas pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan di wilayah kerjanya.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
2. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
4. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
5. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
6. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
7. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
8. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
9. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
11. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
12. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
13. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
15. reviu laporan keuangan;
16. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

17. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
18. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
19. evaluasi sistem pengendalian internal;
20. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;
21. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang berkualitas	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti.	$\frac{\text{jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Total Temuan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah aduan yang diselesaikan}}{\text{jumlah aduan masyarakat}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegritas	$\frac{\text{Jumlah OPD Maturitas SPIP Level 3}}{\text{jumlah OPD pada Irban I}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap

		Jumlah Laporan yang mendukung program Capaian Aksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah	$\frac{\text{Jumlah laporan MCP yang terlaksana}}{\text{jumlahTotal laporan MCP}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD dilakukan Evaluasi SAKIP	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD minimal predikat "BB"}}{\text{jumlah SAKIP OPD pada Irban I}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang direviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah laporan reviu RB OPD}}{\text{jumlah OPD pada Irban I}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan penilaian internal sebagai Syarat Untuk Diusulkan Sebagai Zona Integritas	Assesment dari Tim ZI	Laporan LHE ZI
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Assesment dari BPKP	QA BPKP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II
2. Tugas pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan di wilayah kerjanya.
- Fungsi : 1. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
2. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
4. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
5. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
6. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
7. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
8. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
9. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
11. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
12. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
13. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
15. reviu laporan keuangan;

- 16.reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- 17.Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 18.evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
- 19.evaluasi sistem pengendalian internal;
- 20.pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;
- 21.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
- 22.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang berkualitas	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti.	$\frac{\text{jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Total Temuan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah aduan yang diselesaikan}}{\text{jumlah aduan masyarakat}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern	$\frac{\text{Jumlah OPD Maturitas SPIP Level 3}}{\text{jumlah OPD pada Irban II}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap

		Pemerintah (SPIP) terintegritas		
		Jumlah Laporan yang mendukung program Capaian Aksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah	$\frac{\text{Jumlah laporan MCP yang terlaksana}}{\text{jumlahTotal laporan MCP}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD dilakukan Evaluasi SAKIP	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD minimal predikat "BB"}}{\text{jumlah SAKIP OPD pada Irban II}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang direviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah laporan reviu RB OPD}}{\text{jumlah OPD pada Irban II}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan penilaian internal sebagai Syarat Untuk Diusulkan Sebagai Zona Integritas	Assesment dari Tim ZI	Laporan LHE ZI
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Assesment dari BPKP	QA BPKP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

2. Tugas pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan di wilayah kerjanya.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
2. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
4. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
5. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
6. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
7. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
8. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
9. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
11. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
12. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
13. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
15. reviu laporan keuangan;
16. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

17. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
18. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
19. evaluasi sistem pengendalian internal;
20. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;
21. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang berkualitas	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti.	$\frac{\text{jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Total Temuan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah aduan yang diselesaikan}}{\text{jumlah aduan masyarakat}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegritas	$\frac{\text{Jumlah OPD Maturitas SPIP Level 3}}{\text{jumlah OPD pada Irban III}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap

		Jumlah Laporan yang mendukung program Capaian Aksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah	$\frac{\text{Jumlah laporan MCP yang terlaksana}}{\text{jumlahTotal laporan MCP}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD dilakukan Evaluasi SAKIP	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD minimal predikat "BB"}}{\text{jumlah SAKIP OPD pada Irban III}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang direviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah laporan reviu RB OPD}}{\text{jumlah OPD pada Irban III}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan penilaian internal sebagai Syarat Untuk Diusulkan Sebagai Zona Integritas	Assesment dari Tim ZI	Laporan LHE ZI
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Assesment dari BPKP	QA BPKP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV

2. Tugas pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan di wilayah kerjanya.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
2. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
4. pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
5. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
6. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
7. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
8. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
9. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
11. Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
12. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
13. penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
15. reviu laporan keuangan;
16. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

17. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
18. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
19. evaluasi sistem pengendalian internal;
20. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;
21. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang berkualitas	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti.	$\frac{\text{jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Total Temuan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah aduan yang diselesaikan}}{\text{jumlah aduan masyarakat}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegritas	$\frac{\text{Jumlah OPD Maturitas SPIP Level 3}}{\text{jumlah OPD pada Irban IV}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap

		Jumlah Laporan yang mendukung program Capaian Aksi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah	$\frac{\text{Jumlah laporan MCP yang terlaksana}}{\text{jumlahTotal laporan MCP}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD dilakukan Evaluasi SAKIP	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD minimal predikat "BB"}}{\text{jumlah SAKIP OPD pada Irban IV}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang direviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah laporan reviu RB OPD}}{\text{jumlah OPD pada Irban IV}} \times 100$	Laporan Rekapitulasi dari Evlap
		Jumlah OPD yang dilakukan penilaian internal sebagai Syarat Untuk Diusulkan Sebagai Zona Integritas	Assesment dari Tim ZI	Laporan LHE ZI
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Assesment dari BPKP	QA BPKP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kasubbag Perencanaan
2. Tugas pokok : membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
3. Fungsi : 1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
2. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
3. penyusunan anggaran Inspektorat;
4. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
6. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
7. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat;
8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyusunan perencanaan kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	Terlaksananya dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Dokumen kinerja meliputi 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA 4. DPA

				5. DPPA 6. Perjanjian Kinerja 7. PKPT 8. Rencana Aksi Kinerja
2.	Meningkatnya penyusunan Laporan capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Terlaksananya dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen Capaian Kinerja meliputi : 1.LkjIP 2.LPPD 3.LKPJ 4.Evaluasi Renja 5.Monitpring Capaian Kinerja
3.	Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	Terlaksananya dokumen Kebijakan system dan prosedur pengawasan yang disusun	Dokumen Kebijakan system dan prosedur pengawasan yang disusun 5 SOP dan 17 dokumen Kebijakan sistem

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Koordinator Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
2. Tugas pokok : membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
3. Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Administrasi umum dan keuangan;
 2. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 3. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 4. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 5. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 6. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
 7. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi umum dan keuangan; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang lebih baik	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN	Bukti Lapor LHKPN dan LHKASN yang telah terverifikasi
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Survey Kepuasan Pegawai

3.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Kepuasan Pegawai
4.	Terlaksananya Pengelolaan SDM APIP	Jumlah SDM APIP yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat}}{\text{jumlah ASN}} \times 100$	Laporan rekapitulasi Diklat Pembentukan/ Penjurangan dan Diklat Substantif/ Non Substantif ASN
5.	Terlaksananya Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja, Kepegawaian dan Keuangan	Jumlah dokumen pendukung dalam pemenuhan SAKIP	1. Jumlah Laporan Keuangan dan Aset OPD yang disampaikan dengan tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	Dokumen SAKIP 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Aset OPD 3. Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan ASN.
6.	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan sistem dan pengawasan	Terlaksananya dokumen Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	Dokumen Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang disusun 5 SOP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Koordinator Subbag Analisis dan Evaluasi
2. Tugas pokok : membantu Sekretaris dalam melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Fungsi :
 1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Analisis dan Evaluasi;
 2. penginventarian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 3. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan ;
 4. pengadministrasian dan pengevaluasian laporan hasil pengawasan;
 5. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 6. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 7. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Laporan Semester Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah laporan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan TLHP	Dokumen laporan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan TLHP disampaikan tepat waktu	Laporan Semesteran pada Masing-masing bagian dan sekretariat.
2.	Terlaksannya penyelesaian Rekomendasi Penyelesaian	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP Pengawasan APIP dan BPK RI	Dokumen Laporan Penyelesaian Rekomendasi TLHP yang selesai ditindaklanjuti	Laporan Rekapitulasi laporan hasil pengawasan dan TLHP

	TLHP Pengawasan APIP dan BPK RI			
3.	Terlaksananya Penyelesaian kerugian Daerah	Jumlah Kegiatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Dokumen laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Laporan Kegiatan Majelis TPKD
4.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan	Jumlah Laporan Rakorwas	Dokumen laporan Rakorwas yang selesai dilaksanakan	Laporan Rokorwas
5.	Terlaksananya MCP dan Korsupgah	Jumlah Laporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah	Dokumen laporan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan TLHP yang selesai dan disampaikan tepat waktu	Laporan MCP Korsupgah
6.	Terlaksananya SPI KPK	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK yang telah dilakukan	Adanya penilaian Kuesioner dari kepuasan pegawai.
7.	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Server dan Aplikasi SIM-LHP	Jumlah kegiatan perawatan dan pemeliharaan server dan aplikasi SIM – LHP	Tersedianya Aplikasi SIM-LHP dalam kondisi baik dan dapat digunakan	Aplikasi SIM-LHP



INSPEKTOR KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUNG TOMO, S.Hut.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700604 199803 1 009